

**PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA
TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SIYASAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
NASHIR ROBBANI
07370046**

**PEMBIMBING :
1. DRS. M. RIZAL QASIM, M. SI
2. DRS. H. KAMSI, MA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan provinsi paling tua di Indonesia adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Namun pada akhir-akhir ini, konflik di seputar keistimewaan Yogyakarta mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlangsung. Perdebatan ini berawal dari pernyataan Presiden Yudhoyono di depan sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat tanggal 26 November 2010, menyatakan nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi. Peneliti mencoba mendalami bagaimana sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap keistimewaan Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research* atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan dari lapangan dengan teknik wawancara dengan pengurus FPKS Yogyakarta. Adapun sifat penelitian dengan preskriptif yaitu menganalisa sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera apakah sesuai dengan siyasah syari'ah dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan Al-Qur'an.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai sikap politik PKS terhadap keistimewaan Yogyakarta, didapat bahwa menurut PKS Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 Tahun 1945. Keistimewaan Daerah Yogyakarta Meliputi tiga hal, diantaranya: Pertama, keistimewaan dalam bidang Politik dan Pemerintahan; Kedua, keistimewaan dalam bidang Pertanahan; dan yang Ketiga, keistimewaan dalam bidang Sosial dan Budaya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa PKS menyadari untuk menuju sejarah baru Yogyakarta yang Istimewa, Religius, Demokratis dan Sejahtera tidak mungkin dilakukan seketika, fraksi PKS mengusulkan agar pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal lebih teknis mengenai isi Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, akan disampaikan kepada DPR RI melalui Anggota Fraksi PKS di DPR RI.

Sebagai partai yang berideologi islam, dalam menjalankan fungsi dan mengambil kebijakan, PKS belum sepenuhnya berlandaskan islam. PKS hanya menjadikan sejarah sebagai alasan utama dalam pengambilan kebijakan sikapnya terhadap keistimewaan Yogyakarta, padahal Islam telah mengajarkan agar mengembalikan sepenuhnya kepada AlQur'an dan Sunnah jika terdapat perselisihan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-

BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nashir Robbani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nashir Robbani

NIM : 07370046

Judul : **“PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
YOGYAKARTA BTERHADAP KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1432 H
6 Juli 2011 M

Pembimbing I



Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
NIP: 19630131 199203 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-

BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nashir Robbani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nashir Robbani

NIM : 07370046

Judul : **“PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
YOGYAKARTA BTERHADAP KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1432 H
6 Juli 2011 M

Pembimbing II

Drs. H. Kamsi, MA
NIP:195702071987031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. Fax. 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/ 01 /2011

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul: Pandangan Partai Keadilan Sejahtera
Yogyakarta Terhadap Keistimewaan
Yogyakarta Perspektif Siyasah

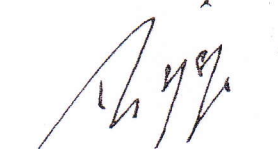
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nashir Robbani
NIM : 07370046
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 September 2011
Nilai munaqosyah : A/B

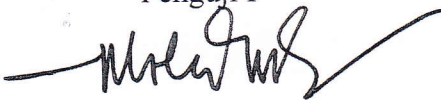
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program
Studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQOSAH

Ketua,

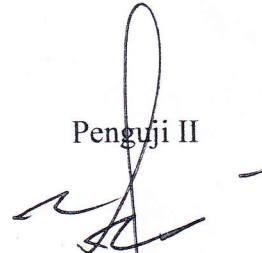

Drs. M. Rizal Oasim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I



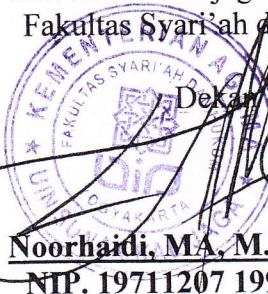
Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II



Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 30 September 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dekan
Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nashir Robbani

NIM : 07370046

Jur. Prodi : Jinayah Siyasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1432 H

20 Juli 2011 M

Penulis



Nashir Robbani
07370046

MOTTO

*Allah tidak akan memberikan cobaan
diluar batas kemampuan manusia, maka
mintalah pertolongan dengan sholat dan
sabar*

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini untuk:

*Bapak dan Ibu, yang telah
memberikan kepercayaan dan kasih
sayang, serta selalu memberi kebebasan
kepadaku untuk menjalani kehidupan dan
pendidikan yang mulia ini dan selalu
memberikan Doa, dorongan, baik moril
maupun materiil.*

*Kepada seluruh sudaraku dan teman-
teman seperjuangan ingat kita kan selalu
berjuang sampai kapanpun.
Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-

م	mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هـ	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūt □ ahdiakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

الله نعمة Ni'matullāh

الفطر زكاة Zakātul-fit□ri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌َ---	Fatkah	A	A
---◌ِ---	Kasrah	I	I
---◌ُ---	Dhammah	U	U

5. Vokal Panjang

i. Fath◌ah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

ii. Fath◌ah◌ dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

iii. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجي Maji>d

iv. D◌ammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

1. Fath◌ah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

2. Fath◌ah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A‘antum

شكرتم لإن La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى Żawi al-furūd □

السنة اهل Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و
اصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “SIKAP POLITIK DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA BTERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA”. Sholawat dan salam tak lupa penulis tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asyari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

3. Dr. M. Nur. S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
4. Subaidi, S.Ag. M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah
5. Drs. Makhrus, M. HUM. Selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Jurusan Jinayah Siyasah.
7. Seluruh Staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.
8. Seluruh staf perpustakaan atas bantuannya dalam pencarian literatur selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Seluruh staf Perpustakaan Daerah DIY, terimakasih atas bantuannya dalam pencarian literatur.
10. Perwakilan DPW PKS Yogyakarta yaitu bapak Arif Budiono. Selaku wakil ketua fraksi PKS DPRD Yogyakarta, terimakasih atas kerjasama dan wawancaranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan bapak, Amien,,,
11. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta serta DPRD DIY terimakasih atas kerjasamanya sehingga penyusun lancar dalam melaksanakan PKL.
12. Rasa terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi.
13. Semua saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tiada tara.

14. Bebebzku Rini Septiani yang selalu ada menemaniku.
15. Teman-temanku terutama Firman Nurkholid yang telah banyak membantu masalah skripsi ini.
16. Yamaha mio putihku yang selalu mengantarku kemanapun aku pergi.
17. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa “tidak ada manusia yang sempurna”, masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1432 H
6 Juli 2011 M

Penyusun



Nashir Robbani
07370046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITRASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoritik	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan PKS Yogyakarta.....	15
B. Dasar Pemikiran dan Tujuan Partai	17
1. Dasar pemikiran.....	17
2. Tujuan	19
C. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera	19
1. Visi	19
2. Misi	20

BAB III PANDANGAN DAN SIKAP POLITIK DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Pandangan PKS Terhadap Keistimewaan Yogyakarta	22
1. Keistimewaan Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan	22
2. Keistimewaan Dalam Bidang Pertanian.....	31
3. Keistimewaan Dalam Bidang Sosial Budaya	35
B. Sikap Politik PKS Terhadap Keistimewaan Yogyakarta.....	38
C. Peran Partai Sebagai Aspirasi Masyarakat	41
1. Peran Partai sebagai Artikulasi Kepentingan.....	41
2. Peran Partai sebagai Agregasi Kepentingan	42
3. Peran Partai sebagai Sosialisasi Politik.....	43
4. Peran Partai sebagai Manajemen Konflik.....	44
5. Peran Partai sebagai Pendorong Partisipasi Masyarakat	46

BAB IV TINJAUAN SIYASAH TERHADAP SIKAP POLITIK PKS TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

A. Kepemimpinan dan Politik Yogyakarta.....	47
B. Pertanian Yogyakarta	54
C. Sosial Budaya.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	68
----------------------	-----------

A. Terjemahan Kutipan Arab, Al-Qur'an.....	69
B. Daftar Pertanyaan DPD FPKS.....	70
C. Curriculum Vitae.....	71

DAFTAR TABLE

No Tabel	Halaman
1. Amanat Sultan Hamengkubuno IX	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan provinsi paling tua di Indonesia adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.¹

¹ “Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta”, <http://id.wikipedia.org/wiki/> akses 28 Maret 2011.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa”.

Namun pada akhir-akhir ini, konflik di seputar keistimewaan Yogyakarta mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlangsung. Kini memasuki ranah yang lebih serius mengenai keinginan masyarakat Yogyakarta untuk referendum terhadap permasalahan tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut ke depannya akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perdebatan ini berawal dari pernyataan Presiden Yudhoyono di depan sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat tanggal 26 November 2010, menyatakan nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh

karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi.²

Namun demikian SBY masih belum bisa mengambil keputusan tegas tentang RUU Keistimewaan DIY. Status Sultan masih digantung dengan diperpanjangnya masa jabatan Gubernur selama 3 tahun untuk memberi waktu penyelesaian RUUK DIY tersebut. Bisa jadi lambatnya pengesahan RUU tersebut diwarnai oleh kalkulasi politik tertentu. Mengingat Sultan adalah sosok yang “berbahaya” diranah politik. Dari komentar SBY yang terkesan sinis dengan mengatakan jabatan Gubernur sekaligus Sultan adalah mirip ketoprak itu mencerminkan kegundahan.³

Penyusun mencoba mengkaji masalah keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang partai politik PKS. Sebagaimana yang kita ketahui, PKS merupakan partai yang berbasis Islam. Bagi PKS, yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai islam yang mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara, teman-teman PKS di berbagai lini yang ada di parlemen atau lainnya senantiasa memperjuangkan urgensi pengelolaan negara yang bersih dari unsur korupsi, kesejahteraan, pendidikan.

Dalam kaitan ini, PKS lebih mendambakan nilai amanah (jujur dan bertanggung jawab) dimasukkan sebagai sistem kekuasaan formal. Nilai-nilai konstruktif seperti ini juga idealnya masuk ke dalam diri para anggota dan pemimpin legislatif sebagai karakter sehingga tingkah laku dan cara kerjanya pun

² A. Wisnubrata, “*Jangan Pertanyakan Keistimewaan Yogyakarta,*” kompas (30 November 2010), hlm. 13.

³ Ade Komarudin, “*Masalah Keistimewaan Yogyakarta Harus Diselesaikan,*” Harian Umum Sore (Senin, 29 November 2010) , hlm. 3.

penuh dengan warna amanah, dapat dipertanggungjawabkan (*akuntable*), dan siap diuji oleh publik karena keterbukaannya (*transparan*).⁴

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

Apa pandangan siyasah syari'ah terhadap pandangan politik DPW PKS Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian yang akan kami jalankan tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian.

1. Tujuan Teoritis dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemikiran politik Partai Keadilan Sejahtera mengenai keistimewaan Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sikap Partai Keadilan Sejahtera mengenai keistimewaan Yogyakarta.
2. Tujuan Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.

⁴ Rachmat Hidayat, *Dari kader untuk bangsa*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2007), Hlm. 11.

- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Syari'ah dan masyarakat umum yang berkompeten dengan studi mengenai partai politik, terutama politik Islam.
2. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang politik Islam.
3. Menambah wacana bagi masyarakat mengenai keistimewaan Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mencoba meneliti pada obyek penelitian tentang partai PKS, dari data yang kami peroleh, penelitian sebelumnya yaitu tentang Strategi PKS, Idiologi Politik PKS, maupun Kiprah PKS dalam Masyarakat. Rupa-rupanya masih menarik untuk dikaji kembali dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai latar belakang yang sudah kami paparkan didepan, bahwa PKS yang berbasis Islam ini menyikapi masalah keistimewaan Yogyakarta.

Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dari penelitian ini, antara lain:

Ahmad Kamillian, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Politik Pks DIY Dalam Memperjuangkan Hak Dan Aspirasi Masyarakat DIY”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS DIY politik yang di jalankan sesuai dengan nilai-nilai hukum syari’at Islam khususnya hukum yang selaras dengan nilai-nilai etika dalam politik Islam.

M. Bahrudin Jamil, dalam skripsinya yang berjudul “Relasi Politik Dan Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”. Menguraikan tentang hubungan antara politik dan dakwah, bagi PKS keikutsertaan di kancah politik adalah untuk mewarnai dunia politik dengan moral/nilai-nilai Islam. Politik adalah bagian kecil dari dakwah. Politik bukan dakwah itu sendiri, karena dakwah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, bermasyarakat dan bernegara sebagai cakupan Islam yang menyeluruh.

Dalam beberapa buku yang ditulis oleh Djony Edward yaitu “*Efek Bola Salju PKS*”. Dalam buku ini menerangkan tentang gerakan-gerakan Partai keadilan Sejahtera dalam perpolitikan Indonesia. Yon Machmudi, dengan bukunya yang berjudul “*Wajah Baru Islam Politik Indonesia*”. Buku ini menjelaskan tentang asal mula PKS dan langkah-langkah dan kiprah PKS dalam kancah perpolitikan Indonesia. Rachmat Hidayat, Nur hasan Zaidi “*Dari Kader Untuk Bangsa*” buku ini berisi tentang berbagai persoalan kebangsaan, dari mulai agama, Poleksosbud dan Hankamnas. Tidak lupa pula “*Sultan Hamengkubono X, Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*” yg menjelaskan tentang seluk beluk

kekuasaan Sultan dan kepemimpinan di kraton Yogyakarta. A. Djazuli “fiqih siyasah” yang menjelaskan tentang siyasah Islam.

F. Kerangka Teoritik

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, olehkarena itu hendaklah memiliki seorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa untuk mendirikan pemerintahan hendaklah memilih pemimpin yang dianggap mampu, sehingga kehidupan masyarakat akan mendapatkan kemakmuran dan keadilan yang hakiki.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (*yaitu pemimpin atau leader*) untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut.⁵ Kepemimpinan dalam Islam disebut Imamah. Menurut Al-Mawardi, imamah adalah:

*“Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”*⁶

Sebuah gerakan kemasyarakatan, khususnya masyarakat politik Islam, sebaiknya memiliki imam yang memiliki kriteria sesuai ajaran Islam, yaitu:

1. Mengetahui Aqidah Illahi.
2. Faham terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Aqidah Illahi.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke-37 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 288.

⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 58.

3. Memelihara agama.
4. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
5. Memelihara dan menjaga keamanan negara.
6. Menegakkan hukum-hukum Allah.⁷

Pokok-pokok kepemimpinan dalam Islam didasarkan atas empat dasar falsafi (*philosophische grondsragen*), antara lain:

1. Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah malik an-nas, pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan Ilahiyah.
2. Kepemimpinan manusia (*qiyadah abasyariyyah*) yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ini ialah *nubuwwah*. Nabi tidak hanya menyampaikan al-qanun al-ilahi dalam bentuk Kitabullah, tetapi juga pelaksana qanun itu. Supaya hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana.
3. Garis imamah melanjutkan garis *nubuwwah* dalam memimpin umat. Setelah zaman para nabi berakhir dengan wafatnya Rasulullah Saw., kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwariskan oleh Rasulullah dan ahl-al-bait-nya. Setelah zaman para nabi, datang zaman 'para imam.

⁷ *Ibid*, hlm. 61.

4. Para faqih adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi.⁸

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada hakikatnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada tungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input. Dengan perkataan lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik sebagai suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik. Kebijakan pemerintahan (*public policy*) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya diselenggarakan dalam arena birokrasi pemerintahan tersebut.⁹

Negara yang baik adalah negara yang mempergilirkan pucuk kekuasaan secara teratur (suksesi) baik itu lewat pemilu, pewarisan tahta, dan sebagainya. Sebab, apabila tidak ada suksesi maka lama-kelamaan kecenderungan para penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar dan akan timbul kesombongan, lupa diri, dan simbolisasi pada diri para penguasa sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep kekuasaan menurut Islam karena dapat membawa para penguasa menjadi penguasa zhalim dan tiran. Namun,

⁸ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini : Filsafat Politik Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2002), hlm. 15-16.

⁹ Jrg. Jopari, *Ilmu pemerintahan*, (Universitas Indonesia: jakarta, 2008), hlm. 89.

dalam Islam tidak ada konsep pergiliran kekuasaan secara jelas, bahkan konsep pembatasan masa jabatan dari pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada masa *Khulafaur Rasyidin* belum ada, tetapi karena hal ini merupakan bentuk kemaslahatan untuk negara dan tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan hadist maka pembatasan dan pergiliran kekuasaan dalam Islam hukumnya adalah boleh. Sehingga masalah pergiliran kekuasaan dan pembatasan masa jabatan pemimpin adalah masalah baru dalam konsep kekuasaan Islam. Oleh karena itu, masalah ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui itjihad ulama—sebagai sumber hukum negara Islam yang ketiga.¹⁰

Sedangkan mengenai permasalahan tentang bentuk negara Islam, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist, tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana seharusnya bentuk negara Islam. Sehingga permasalahan mengenai bentuk negara Islam merupakan itjihad dari masing-masing ulama untuk menentukan suatu bentuk negara itu apakah sebuah kerajaan atau republik. Karena itu, perbedaan tentang bentuk negara Islam bukanlah permasalahan fundamental dalam konsep politik Islam. Terlepas dari bagaimana bentuk negara Islam itu seharusnya, bentuk negara Islam bukanlah suatu permasalahan substansi dari pembahasan menyangkut konsep politik dan kekuasaan dalam Islam.

Kekuasaan (negara) terbentuk dari kepercayaan (*trust /social contract*). Sedangkan trust terbentuk dari pemahaman, standarisasi, dan tata nilai. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh perubahan pemahaman, standarisasi, dan tata nilai. Jika pemahaman, standarisasi, dan tata nilai kufur sudah berganti menjadi menjadi islamiy, maka kekuasaan (negara) akan berubah.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 83.

Untuk itu, konsens partai politik Islam harusnya diarahkan untuk membentuk pemahaman, standarisasi, dan tata nilai Islam. Sebab, dengan cara inilah *trust* sekuleristik bisa dihancurkan. Ketika *trust* telah hancur, maka rakyat akan menyerahkan *trust*-nya kepada partai politik Islam; dan pada saat itu muncullah kekuasaan Islam. Akan tetapi, selama proses edukasi umat dengan pemahaman, standarisasi, dan tata nilai Islam tidak dijalankan, sangatlah sulit mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari rakyat.

Berangkat dari kedua teori diatas kami ingin mencoba memaparkan bagaimana sikap PKS yang merupakan partai politik Islam yang berperan dalam perpolitikan dan pembangunan Indonesia mengenai seputar polemik keistimewaan Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan *Field Research*, yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk peneliti sikap politik PKS dalam polemik yang terjadi di masyarakat tentang keistimewaan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan deskriptif-analitik, Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat.¹¹ Analitik Adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih

¹¹ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2004) , hlm. 6.

mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹² Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci pemikiran partai politik, sedangkan analisis adalah menguraikan data dengan cermat dan terarah. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti mengenai pemikiran politik PKS terhadap polemik yang terjadi di masyarakat mengenai keistimewaan Yogyakarta.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam struktur kepartaian yang kami teliti. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Organisasi Partai PKS dalam menyikapi keistimewaan Yogyakarta.

4. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah PKS Yogyakarta.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa informan yang dianggap berperan penting seperti DPD atau DPC dari partai yang kami jadikan objek penelitian yaitu, PKS, tokoh masyarakat, serta beberapa masyarakat setempat yang dipilih secara sampling.

b. Data Sekunder

¹² Masri Sanyarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 263.

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk kefalitan data. Data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa Buku, Arsip, Majalah Ilmiah, Disertasi, Tesis, Surat Kabar, Dokumen dan lain sebagainya. Disamping beberapa sumber tertulis, terdapat pula Foto, Grafik, Data Statistik, maupun Tabel dan Gambar yang merupakan data sekunder yang dapat mendukung keabsahan suatu data.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa Buku, Surat Kabar, dan hal-hal yang menunjuk kepada pendukung data tentang pemikiran politik PKS tentang keistimewaan Yogyakarta serta menyikapi polemik yang terjadi dimasyarakat yogyakarta.

5. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan historis yang merujuk pada kejadian masa lalu dan pemikiran PKS yang melibatkan Struktur Pengurus PKS dan masyarakat.

6. Teknik Analisa Data

Adapu teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana teknik ini mendeskripsikan data-data yang ada kemudian menganalisa sehingga memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek yang akan diteliti dan kemudian mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Seperti karya ilmiah lainnya untuk memudahkan penulisan penelitian ini, penulis membagi pada pembahasan hasil penelitian menjadi lima bab.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menyajikan data-data yang kami peroleh dari hasil penelitian baik dari lapangan maupun dari referensi atau literatur-literatur yang ada, yang meliputi hasil wawancara maupun dari dokumen-dokumen instansi terkait. Yang berisi tentang latar belakang PKS serta sejarah perkembangan PKS, kebijakan dasar PKS, visi dan misi dalam perjalanan politiknya.

Bab Ketiga, pemikiran dan sikap politik PKS mengenai keistimewaan Yogyakarta. Menjelaskan tentang pandangan PKS terhadap keistimewaan Yogyakarta, sikap PKS mengenai Keistimewaaan Yogyakarta.

Bab Keempat, analisa siyasah terhadap sikap DPW PKS tentang keistimewaan Yogyakarta, mencakup tinjaua siyasah terhadap pandangan PKS tentang keistimewaan Yogyakarta.

Bab Kelima, penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai sikap DPW partai keadilan sejahtera maka dapat ditarik kesimpulan sesuai rumusan yang penulis sampaikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Sedangkan Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Keistimewaan Daerah Yogyakarta Meliputi tiga hal, diantaranya. *Pertama*, keistimewaan dalam bidang Politik dan Pemerintahan. *Kedua*, keistimewaan dalam bidang Pertanahan. *Ketiga*, keistimewaan dalam bidang Sosial dan Budaya.

Pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan Yogyakarta PKS sangat menghargai dan memahami jejak sejarah yang mendasar dari Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan menggabungkan 2 (dua) Kerajaan yang beliau berdua pimpin dengan bayi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui Maklumat 5 September 1945 yang fenomenal

tersebut , sehingga dengan bergabungnya dua kerajaan ini, posisi tawar dan politik NKRI menjadi kuat dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal inipun telah diakui pula oleh Bapak pendiri bangsa ini dengan mengakuinya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat provinsi, dipimpin oleh Dwitunggal Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Kedua, di bidang pertanahan PKS menghargai *Rijksblad* Kesultanan 1918 Nomor 16 dan *Rijksblad* Pakualaman 1918 Nomor 18 kedua kerajaan itu menyatakan kekuasaannya sebagai berikut: “ semua bumi yang tidak terbukti dimiliki orang lain dengan hak eigendom, adalah kepunyaan kerajaan Ngayogyakarta”. Atas dasar pernyataan domein itu pemerintah Kasultanan dan Pakualaman memberikan “ hak pakai/wewenang anggadhuh cara jawa” kepada desa-desa (pasal 3 ayat 1) yang harus dibentuknya. Dikemudian hari berdasarkan *Rijksblad* Kasultanan Nomor 6 Tahun 1926 dan *Rijksblad* Paku Alaman Nomor 26 Tahun 1925 “hak anggadhuh” dari desa itu diubah menjadi “hak andharbeni/wewenang andharbeni”, yaitu suatu hak tradisional lokal yang pemanfaatannya telah dengan jelas untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks tersebut, bahwa tanah sebagai pilar pertama keistimewaan Yogyakarta tidak saja merupakan wilayah kekuasaan territorial jurisdiction bagi Sri Sultan dan Sri Paku Alam, melainkan juga sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat secara lebih berdaya guna.

Ketiga, dalam bidang sosial budaya Terdapat tiga pemaknaan keistimewaan Yogyakarta dari segi budaya. *Pertama*, Keraton sebagai institusi

adat yang melukiskan karya adi luhung (*court culture*). *Kedua*, unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan. *Ketiga*, fungsi Sultan sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralis.

Dengan demikian, dinasti Hamengku Buwono telah membuktikan diri sebagai Khalifatullah yang hamengku, hamengku dan hamengkoni masyarakat bangsanya, serta telah berhasil mengaplikasikan nilai-nilai luhur pada tatanan masyarakat yang berbudaya Islami, namun tetap menghargai kemajemukan dan keragaman religiusitas masyarakat seperti halnya pernah terjadi pada masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw di kota Madinah Al Munawwaroh pada waktu dahulu.

Namun persepsi dan sikap pengambilan kebijakan PKS masih menilai keistimewaan Yogyakarta hanya melalui sejarah dan kebudayaan masyarakatnya saja. Sebagai partai dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sudah sepantasnya lah jika dalam persepsi dan pengambilan kebijakan mengenai keistimewaan Yogyakarta berlandaskan atas siyasah islam. Sehingga konsep ketatanegaraan islam dapat terealisasikan secara kaffah.

Kemudian dalam hal menjalankan fungsinya, PKS mengajak Kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Fraksi PKS mengajak marilah kita perjuangkan keistimewaan Yogyakarta dengan cara cara yang istimewa yakni perjuangan yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan bermartabat, sebagaimana karakter rakyat Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan akhlaq mulia. Jangan sampai ada darah yang tercecceh, jangan ada perilaku anarkhis. Kita tunjukkan kepada

Indonesia, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Yogyakarta menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, mampu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Mari kita torehkan sejarah perjuangan keistimewaan Yogyakarta dengan tinta kejuangan yang dapat dibanggakan oleh anak cucu kita.

B. Saran

1. Sebagai partai yang berideologi islam, hendaklah menjadikan hukum-hukum islam sebagai landasan kebijakan, sehingga corak partai islam dalam PKS dapat terealisasi.
2. Lebih memperjuangkan hukum-hukum yang sesuai syari'at islam, sehingga tujuan PKS sebagai partai dakwah dapat terwujud.
3. Sebagai partai islam harus membawa nilai-nilai islam dalam menjalankan program-program kepartaian.
4. Harus lebih menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A) Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994

B) Fiqih/Usul Fiqih

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007

C) Hukum/Undang-undang/Peraturan-peraturan

UU Dasar 1945 pasal 18 diambil dari <http://www.Legalitas.org>

D) Referensi Buku

Azwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004

An Nabhani, Taqqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (terj.). Surabaya: Risalah Gusti. 1996

Edward, Djon, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Syamsil Cipta Media, 2006

Hidayat, Rachmat, *Dari Kader Untuk Bangsa*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2007

Jopari, Jrg. *Ilmu pemerintahan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cetakan Pertama, Penerbit Dian Rakyat, 1967

Maryadi, *Keadilan Islam*, cetakan Pertama, Surakarta: Muhammadiyah Universiti Prees, 2002

Muhammad ali, Maulana, *Islamologi Dinul Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Vam Hoeve, 1980

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta : UI Press, 1979

- Razak, Narsruddin, *Dienul Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, cet II, 1977
 Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Moderen 1500-2004*, Jakarta : Serambi, 2005
- Sanyarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke-37, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Suhartono, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Surakarta 1830-1920*, , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Sujanto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Brna Aksara, 1988
- Sunanto, Musyriifa, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini : Filsafat Politik Islam*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2002

E) Surat Kabar

- Bernas Jogja, 6 Agustus 2008
- Harian Umum Sore, 29 November 2010
- Harian Jogja, 7 mei 2011
- Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 2010
- Kompas, 30 November 2010
- Kompas, 13 januari 2011
- Koran Sindo, 27 Januari 2011
- Koran Tempo, 10 Februari 2010

F) Lain-lain

- Amhar, Fahmi, *Menggagas Sistem Pertanahan Syariah*, www.jurnal-ekonomi.org, di akses 12 mei 2011
- Anas, Andi, *Konsep Wilayah Al-Faqih Menurut Imam Khomeini*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama UNISBA, 2006

- Huda, Ni'matul, "Pengaturan Tanah-Tanah Kraton Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960", Makalah, disampaikan dalam Lokakarya RUU Keistimewaan Yogyakarta, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Yogyakarta, 24 April 2007
- Kepemimpinan Dalam Islam*, <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science>, htm. Akses 11 Mei 2011
- Menggugat Efektifitas Fungsi Partai Politik*", <http://bakpiajogja.blogspot.com>, akses 2
- Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, <http://id.wikipedia.org/wiki/> akses 28 Maret 2011
- Sri Sultan Hamengku Buwana X, *Perenungan Tentang Kepemimpinan*.<http://forum.detik.com/showthread>. Diakses tanggal 25 Juli 2011
- Suyitno, "*Tanah Keraton (SG-PAG)*", Makalah, disampaikan dalam Sarasehan Format Keistimewaan Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kebhinekaan Republik Indonesia, Kerjasama UGM dengan Kagama DIY, 9-10 Mei 2007
- Wawancara, dengan Arif Budiono wakil ketua fraksi PKS DPRD DIY, Yogyakarta, tanggal 24 April 2011

LAMPIRAN

Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur'an

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1	18	8	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Aku takut kepada sembahhan-sembahhan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan-sembahhan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukanNya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui. - Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
BAB IV			
1	48	2	Imam adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti yugas kenabian untuk memelihara agama dan mengendalikan dunia.
2	52	7	Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengarahan dari masyarakat dan politik Negara, karena apabila demikian Negara itu tidak islami.
3	55	11	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

DAFTAR PERTANYAAN DPD FPKS DIY

1. Bagaimana persepsi PKS terhadap daerah keistimewaan Yogyakarta?
2. Fungsi PKS sebagai partai politik terkait Keistimewaan Yogyakarta?
3. Sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta terhadap Keistimewaan Yogyakarta?

CURRICULUME VITAE

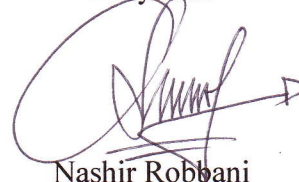
1. Nama : Nashir Robbani
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 16 Oktober 1989
3. Alamat Asal : Desa Banjar Seminai no. 14 kec. Dayun kab. Siak Riau
4. Alamat Sekarang : Gedong Kuning KG1 no. 292 yogyakarta
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Hobby : Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bilyard
7. E-mail : n_robhani@yahoo.com
8. Riwayat Orang Tua
 - ✓ Nama Ayah : Machsun
 - ✓ Pekerjaan : Petani
 - ✓ Nama Ibu : Sunarti
 - ✓ Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Desa Banjar Seminai no. 14 kec. Dayun kab Siak Riau

Riwayat Pendidikan

- ✓ SD.N 045 : Lulus Tahun 2001
- ✓ Al-Furqon : Lulus Tahun 2005
- ✓ MAK MAN Yogyakarta I : Lulus Tahun 2007
- ✓ UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2007

Yogyakarta, 25 Juni 2011

Penyusun



Nashir Robbani

07370046